

**Pelaksanaan Pengawasan Oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja
Dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran Dalam Meningkatkan Kinerja Tenaga
Kesejahteraan Sosial (TKSK)
(Studi Kasus Di Desa Selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran)**

Desi Mustikawati

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan kurangnya pengawasan yang optimal oleh Dinas Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran terhadap (TKSK). Hal ini terlihat dari : 1) TKSK seringkali tidak melakukan pemetaan sosial berupa pendataan PMKS dan PSKS dan/atau data dan informasi lainnya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, 2) TKSK jarang melakukan sinergi, integrasi, dan sinkronisasi dengan camat dan/atau perangkat organisasi dibawahnya, 3) TKSK jarang melakukan kegiatan penyuluhan dan bimbingan sosial atas inisiatif sendiri. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan jumlah informan sebanyak 8 orang. Adapun teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan meliputi tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, display data, serta verifikasi dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Pelaksanaan Pengawasan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran dalam Meningkatkan Kinerja Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK) (Studi Kasus di Desa Selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran) secara umum telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini terbukti dari 9 indikator yang diteliti 7 indikator sudah dilaksanakan dengan baik, dan 2 indikator belum dilaksanakan dengan baik. Hambatan-hambatan yang ditemukan antara lain 1) Terbatasnya jumlah sumber daya manusia 2) TKSK kurang disiplin yang ditandai seringkali tidak hadir pada saat dilakukan pengarahan, koordinasi, monitoring dan evaluasi, ataupun pada saat TKSK diminta untuk menyampaikan laporan lisan secara langsung, serta tidak membuat dan menyerahkan laporan secara tertulis pada waktu yang ditentukan. Upaya yang dilakukan yaitu dengan : 1) Meningkatkan intensitas komunikasi dengan TKSK melalui handphone, dan memaksimalkan pengawasan melalui pertemuan monitoring dan evaluasi kinerja TKSK tiap bulan, 2) Menginstruksikan kepada ketua forum komunikasi TKSK untuk menyampaikan hasil dari pengarahan, ataupun monitoring dan evaluasi kepada TKSK yang berhalangan hadir, serta memberikan teguran secara lisan juga himbauan kepada TKSK untuk hadir dan memberikan laporan tertulis sesuai waktu yang telah ditentukan.

***Kata Kunci:* Pengawasan dan Kinerja**

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Dewasa ini, kita hidup di jaman milenium dimana modernisasi dan kemajuan peradaban nyatanya tidak menjamin kehidupan seluruh umat manusia sejahtera dan berkecukupan, hal ini seperti yang dikemukakan (Suharto, 2013:27), bahwa :

Saat ini, kita hidup di awal abad ke-21. Sebuah jaman milenium yang sejatinya ditandai oleh modernisasi, kemajuan peradaban, dan kualitas hidup umat manusia. Kenyataannya dunia masih mempunyai paradox dan tetap menyisakan nestapa, terutama bagi kaum papa di negara-negara miskin dan berkembang. Sementara industrialisasi, pertumbuhan ekonomi dan modernisasi terus meningkat di negara-negara maju, sejumlah besar penduduk

dunia masih hidup dalam situasi sulit dan mencemaskan.

Keadaan tersebut juga berlaku di Indonesia. Pemerintah dirasa belum mampu mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada sehingga perlu untuk berbenah guna mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti yang dikemukakan (Suharto, 2013:29) bahwa :

Sudah semestinya jika pemimpin, pembuat kebijakan, dan siapa saja yang tergerak membangun Indonesia untuk menengok kembali dan memperkuat konsepsi manajemen pemerintahan berdasarkan tujuan bernegara yang digagas oleh para pendiri bangsa, yaitu sistem negara kesejahteraan.

Melihat masih banyaknya masyarakat yang tergolong miskin ataupun masyarakat yang termasuk dalam penyandang masalah kesejahteraan sosial di Indonesia, kiranya sistem negara kesejahteraan memang tepat dijadikan sebagai salah satu solusi.

Adanya masalah kesejahteraan di Indonesia telah menjadi perhatian banyak kalangan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial di Indonesia, yaitu ditandai dengan lahirnya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Adapun pengertian dari kesejahteraan sosial menurut pasal 1 UU Nomor 11 Tahun 2011 yaitu, “Kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.”

Dalam penyelenggaraannya, kesejahteraan sosial dilakukan pemerintah dengan mengikutsertakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, seperti yang tercantum dalam pasal 2 UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial yang berbunyi :

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Selanjutnya, masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial menurut pasal 1 UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial ini antara lain :

1. Tenaga Kesejahteraan Sosial, adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
2. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan

tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

3. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
4. Pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial, dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
5. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Sedangkan yang dimaksud dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yaitu :

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di kecamatan.

Tugas dari TKSK menurut pasal 4 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan meliputi :

1. Melakukan pemetaan sosial berupa pendataan PMKS dan PSKS dan/atau data dan informasi lainnya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
2. Melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang ditugaskan oleh Kementerian Sosial, dinas/instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota, dan kecamatan;
3. Melakukan koordinasi dengan PSKS dan sumber daya manusia kesejahteraan sosial lainnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
4. Melakukan sinergi, integrasi, dan sinkronisasi dengan camat dan/atau

- perangkat organisasi dibawahnya antara penyelenggara kesejahteraan sosial dan penyelenggara tugas umum pemerintahan dan/atau pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan;
5. Melakukan kegiatan penyuluhan dan bimbingan sosial baik atas inisiatif sendiri maupun atas penugasan dari berbagai pihak; dan
 6. Mengembangkan partisipasi sosial masyarakat dan jejaring kerja dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas tentang pengawasan oleh Dinas Sosial dalam meningkatkan kinerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Studi Kasus di Desa Selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran).

Adapun dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan seperti:

1. TKSK seringkali tidak melakukan pemetaan sosial berupa pendataan PMKS dan PSKS dan/atau data dan informasi lainnya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
2. TKSK jarang melakukan sinergi, integrasi, dan sinkronisasi dengan camat dan/atau perangkat organisasi dibawahnya antara penyelenggara kesejahteraan sosial dan penyelenggara tugas umum pemerintahan dan/atau pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan.
3. TKSK jarang melakukan kegiatan penyuluhan dan bimbingan sosial atas inisiatif sendiri.

Permasalahan diatas muncul diduga karena pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran terhadap Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) belum dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan permasalahan diatas peneliti tertarik untuk membuatsuatu penelitian dengan judul “Pelaksanaan Pengawasan Oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran Dalam Meningkatkan Kinerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Tksk) (Studi Kasus di Desa Selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran)”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan

- Transmigrasi Kabupaten Pangandaran dalam meningkatkan kinerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) (Studi Kasus di Desa Selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran)?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang muncul dalam Pelaksanaan Pengawasan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran dalam meningkatkan kinerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) (Studi Kasus di Desa Selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran) ?
 3. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang muncul dalam Pelaksanaan Pengawasan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran dalam meningkatkan kinerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) (Studi Kasus di Desa Selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran)?

II. TINJAUAN TEORITIS

2.1 Tinjauan Pengawasan

Istilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah “awas”, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *controlling* yang diterjemahkan dengan istilah pengawasan dan pengendalian. Dengan demikian istilah *controlling* lebih luas artinya daripada pengawasan. Akan tetapi, di kalangan ahli atau sarjana pengertian “*controlling*” ini disamakan dengan pengawasan. Jadi pengawasan termasuk pengendalian.

Terry dalam Mukarom dan Laksana (2015:156), “Pengawasan sebagai mendeterminasi semua kegiatan yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.”

Pengawasan sebagai mendeterminasi semua kegiatan yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Robbin (Mukarom dan Laksana, 2015:156) menyatakan bahwa, “Pengawasan merupakan suatu proses aktivitas yang sangat mendasar sehingga membutuhkan

seorang manajer untuk menjalankan tugas dan pekerjaan organisasi.”

Sedangkan Siagian (Mukarom dan Laksana, 2015:156) menyebutkan bahwa, “Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.”

Selanjutnya, Mukarom dan Laksana (2015:157) menyatakan bahwa:

Pengawasan merupakan suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas, dapat dikatakan bahwa pengawasan adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengendalikan proses pelaksanaan supaya hasil pekerjaan dapat meningkat ataupun sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kemudian untuk melakukan pengawasan itu sendiri diperlukan teknik-teknik pengawasan. Siagian (2008:115) mengemukakan teknik-teknik pengawasan, yaitu :

1. Teknik pengawasan langsung, apabila pimpinan mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang berjalan. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk :
 - 1) Inspeksi Langsung
 - 2) *On-the-spot observation*
 - 3) *On- the-spot-report*
2. Teknik pengawasan tidak langsung, pengawasan yang dilaksanakan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan.

Sedangkan Devung (1998:126), metode /teknik pengawasan dibagi dalam dua kategori utama, yaitu :

- a. Metode pengawasan non kuantitatif, bersifat umum terhadap kegiatan dan keadaan organisasi dan lebih banyak menyangkut kerja karyawan. Beberapa teknik yang biasa digunakan menurut Leon C.Menggison,cs dalam Devung (1998:126) adalah observasi, pengawasan berkala, laporan lisan dan tertulis, penilaian kegiatan, dan diskusi antar manajer dan karyawan.

- b. Metode pengawasan kuantitatif, bersifat lebih spesifik, dengan menggunakan tinjauan data kuantitatif untuk mengukur dan mengadakan penyesuaian seperlunya atas jumlah maupun kualitas barang atau jasa yang dihasilkan atau ditawarkan kepada konsumen

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ada beberapa teknik dalam melakukan pengawasan, yaitu teknik pengawasan non kuantitatif dan kuantitatif, serta teknik pengawasan langsung dan tidak langsung. Teknik pengawasan non kuantitatif dan teknik pengawasan langsung, memiliki persamaan antara lain dapat dilihat dari adanya observasi langsung ke lapangan, mendengarkan laporan lisan dari pihak yang diawasi, dan diskusi ataupun evaluasi antar pihak pengawas dan yang diawasi. Kemudian teknik pengawasan kuantitatif dan teknik pengawasan tidak langsung juga memiliki kesamaan yaitu sama-sama dengan melakukan peninjauan data tertulis.

2.2 Tinjauan Kinerja

Mangkunegara (2006:67), “Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya”. Adapun Sedarmayanti (2011:260) mengungkapkan bahwa:

Kinerjamerupakanterjemahandariperformance yangberartihasil kerjaseorangpekerja, sebuahprosesmanajemenatauorganisasisekar eseluruhan,dimana hasil kerja tersebut harus dapat ditunjukkan buktinya secara konkrit dan dapat diukur (dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan).

Dengan demikian, kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas seseorang baik secara kualitas maupun kuantitas dan dapat ditunjukkan buktinya secara konkrit dan dapat diukur (dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan).

2.3 Tinjauan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, bahwa yang dimaksud dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKSK adalah :

Seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial

dan/atau dinas/instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di kecamatan.

Tujuan dibentuknya TKSK sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2013 tentang TKSK adalah :

1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan;
2. terwujudnya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan; dan
3. terjalinnya kerja sama dan sinergi antara program penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan program-program pembangunan lainnya di tingkat kecamatan.

Kemudian dalam pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2013 tentang TKSK disebutkan bahwa, ”(1)TKSK berkedudukan di kecamatan. (2) TKSK mempunyai wilayah kerja di satu wilayah kecamatan yang meliputi desa atau kelurahan.”Sedangkan tugas dari TKSK menurut pasal 4 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2013 tentang TKSK meliputi :

1. melakukan pemetaan sosial berupa pendataan PMKS dan PSKS dan/atau data dan informasi lainnya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
2. melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang ditugaskan oleh Kementerian Sosial, dinas/instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota, dan kecamatan;
3. melakukan koordinasi dengan PSKS dan sumber daya manusia kesejahteraan sosial lainnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
4. melakukan sinergi, integrasi, dan sinkronisasi dengan camat dan/atau perangkat organisasi dibawahnya antara penyelenggara kesejahteraan sosial dan penyelenggara tugas umum pemerintahan dan/atau pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan;
5. melakukan kegiatan penyuluhan dan bimbingan sosial baik atas inisiatif sendiri maupun atas penugasan dari berbagai pihak; dan

6. mengembangkan partisipasi sosial masyarakat dan jejaring kerja dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut pendapat Surakhmad (1985:139) bahwa:

Metode deskriptif adalah penelitian yang tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang. Penelitian ini menuturkan dan menafsirkan data yang ada, misal tentang situasi yang dialami, satu hubungan, kegiatan, pandangan, sikap yang nampak atau tentang satu proses yang sedang berlangsung, pengaruh yang sedang bekerja, kelainan yang sudah muncul, kecenderungan yang menampak, pertentangan yang meruncing, dan sebagainya.

Sedangkan pendekatan kualitatif menurut Sugiyo (2014:1) mengemukakan bahwa :

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat dijelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci yang tujuannya untuk mencari makna dari sebuah fenomena.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memahami dan menafsirkan makna suatu fenomena – fenomena yang terjadi, kemudian berusaha untuk menganalisis, dan menjelaskan fenomena–fenomena tersebut yang selanjutnya penulis berusaha untuk memberikan penilaian. Dengan menggunakan model penelitian deskriptif kualitatif ini akan lebih memberikan penganalisaan secara mendalam, sehingga penulis dapat menggambarkan permasalahan – permasalahan yang terjadi terkait dengan Pelaksanaan Pengawasan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran dalam meningkatkan kinerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) (Studi Kasus di Desa Selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran).

3.2 Data Dan Sumber Data

3.2.1 Data

Data dalam penelitian kualitatif menurut pendapat Miles dan Huberman (Silalahi 2012:284) adalah :

Data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan kukuh, serta memuat penjelasan tentang proses – proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Dengan data kualitatif kita dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab – akibat dalam lingkup pikiran orang – orang setempat, dan memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat. Dan lagi, data kualitatif lebih condong dapat membimbing kita untuk memperoleh penemuan – penemuan yang tak terduga sebelumnya dan untuk membentuk kerangka teoritis baru ; data tersebut membantu para peneliti untuk melangkah lebih jauh dari praduga dan kerangka kerja awal.

Dengan demikian, data dalam penelitian ini adalah data yang berkenaan dengan : 1) pelaksanaan pengawasan dalam meningkatkan kinerja, 2) Teknik-teknik pengawasan.

3.2.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun yang dimaksud sumber data primer menurut Silalahi (2009:289) bahwa “suatu objek atau dokumen original material mentah dari perilaku yang disebut *first hand information*. Data yang dikumpulkan dari situasi aktual ketika peristiwa terjadi”.

Selanjutnya sumber data sekunder menurut Silalahi (2009:291) mengemukakan bahwa sumber data sekunder adalah “data yang dikumpulkan melalui sumber – sumber lain yang tersedia. Sumber sekunder meliputi komentar, intervensi, atau pembahasan tentang materi original”.

Berdasarkan penjelasan tersebut penulis menetapkan untuk sumber data primer adalah pegawai Dinas Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran, TKSK, Pegawai Kecamatan Parigi, dan Pemerintah Desa Selasari. Informan atau

narasumber untuk penelitian ini sebanyak 8 orang. Adapun secara terperinci adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran.
2. Kepala Sub bagian kepegawaian dan umum Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran.
3. Kepala Bidang Sosial Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran.
4. Kepala Seksi Pembinaan Kesejahteraan Sosial Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran.
5. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Parigi.
6. Pegawai Kecamatan Parigi yaitu Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa.
7. Kepala Desa Selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.
8. Perangkat Desa Selasari yaitu Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat.

Sementara itu untuk sumber data sekunder meliputi dokumen – dokumen, peraturan – peraturan yang berkaitan dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. Data sekunder diperlukan untuk melengkapi pembahasan serta untuk mendukung data primer yang berasal dari sumber aslinya.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara
Menurut Idrus (2009:85), “wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut *interviewer*, sedangkan orang yang diwawancara disebut *interviewee*.”
2. Observasi
Definisi observasi menurut Young dan Schmidt (1973) yaitu : sebagai pengamatan sistematis berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena-fenomena yang nampak. Perhatian yang dimaksud adalah harus diberikan kepada unit kegiatan yang lebih besar atau lebih luas kepada fenomena-fenomena khusus yang diamati terjadi. Observasi merupakan suatu pengamatan secara langsung dengan sistematis terhadap gejala-gejala yang hendak diteliti. Oleh karena observasi menjadi salah

satu teknik pengumpulan data jika: sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, dan dikontrol reliabilitasnya dan validitasnya.

3. Dokumentasi

Dalam pengumpulan data, selain dengan wawancara dan observasi, peneliti juga melakukan pengumpulan data melalui arsip, catatan, dan segala bentuk peraturan perundang – undangan, dan sebagainya. Berdasarkan pendapat dari Arikunto (1985:132) bahwa “metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal – hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya”.

3.4 Teknik Analisis Data

Dalam membahas tentang analisis data dalam penelitian kualitatif, para ahli memiliki pendapat yang berbeda. Huberman dan Miles mengajukan model analisis data yang disebutnya sebagai model interaktif. Model interaktif ini terdiri dari tiga hal utama, yaitu :

- (1) reduksi data; (2) penyajian data; dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi.”

Ketiga kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis (Miles dan Huberman, 1992).

Secara umum, langkah – langkah pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (Muhammad Idrus, 2009:148) yaitu sebagai berikut :

1. Tahap pengumpulan data

Dalam proses analisis data interaktif ini kegiatan yang pertama adalah pengumpulan data. Adapun dalam proses pengambilan data kualitatif biasanya dilakukan dengan cara *partisipant observation* (pengamat terlibat), yaitu dengan cara peneliti melibatkan diri dalam kegiatan masyarakat yang ditelitinya, sejauh tidak mengganggu aktivitas keseharian masyarakat tersebut. Beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai pedoman saat pengumpulan data di lapangan antara lain sebagai berikut : a) fokus pada objek penelitian; b) menentukan jenis penelitian; c) membuat pertanyaan analitis; d) memulai dari yang makro; e) mengomentari gagasan; d) memo untuk diri sendiri.

2. Tahap reduksi data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Tahap reduksi data merupakan bagian kegiatan analisis sehingga pilihan-pilihan peneliti tentang bagian data mana yang dikode, dibuang, pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian tersebut, cerita-cerita apa yang berkembang, merupakan pilihan-pilihan analitis. Dengan begitu proses reduksi data dimaksudkan untuk lebih menajamkan, mngolongkan, mengarahkan, membuang bagian data yang tidak diperlukan, serta mengorganisasi data sehingga memudahkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses verifikasi.

3. Display data

Langkah berikutnya setelah proses reduksi data berlangsung adalah penyajian data, yang dimaknai oleh Miles dan Huberman (1992) sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data ini, peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Artinya apakah peneliti meneruskan analisisnya atau mencoba untuk mengambil sebuah tindakan dengan memperdalam temuan tersebut.

4. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir proses pengumpulan data adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan, yang dimaknai sebagai penarikan arti data yang telah ditampilkan. Pemberian makna ini tentu saja sejauh pemahaman peneliti dan interpretasi yang dibuat oleh peneliti. Beberapa cara yang mungkin dilakukan dalam proses ini adalah dengan melakukan pencatatan untuk pola-pola dan tema yang sama, pengelompokan, dan pencarian kasus-kasus negatif (kasus khas, berbeda, mungkin pula menyimpang dari kebiasaan yang ada di masyarakat).

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Pelaksanaan Pengawasan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran dalam Meningkatkan Kinerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) (Studi Kasus di

Desa Selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran)

Untuk mengetahui Pelaksanaan Pengawasan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran dalam Meningkatkan Kinerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) (Studi Kasus di Desa Selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran), peneliti dalam hal ini melakukan observasi serta wawancara terhadap pegawai Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Pangandaran, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Parigi, pegawai Kecamatan Parigi dan perangkat Desa Selasari.

Berikut ini peneliti akan menjelaskan secara ringkas hasil penelitian dan pembahasan mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran dalam meningkatkan kinerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dengan mengacu kepada indikator yang ada yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rekapitulasi Hasil Penelitian Mengenai Pelaksanaan Pengawasan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran dalam Meningkatkan Kinerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
(Studi Kasus di Desa Selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran)

No	Indikator	Hasil Penelitian
1	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengamati pelaksanaan tugas TKSK dengan melihat teknik pelaksanaan tugas yang dilakukan TKSK.	Belum dilaksanakan
2	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas TKSK	Sudah dilaksanakan
3	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan pengawasan terhadap TKSK dalam pelaksanaan tugasnya.	Belum dilaksanakan
4	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mendengarkan dan melihat laporan secara langsung dari TKSK.	Sudah dilaksanakan
5	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan evaluasi dan koordinasi dengan TKSK secara rutin maupun secara kondisional disesuaikan dengan program yang dijalankan TKSK.	Sudah dilaksanakan
6	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi meminta laporan secara tertulis setiap satu bulan sekali	Sudah dilaksanakan
7	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi meminta laporan secara lisan setiap satu bulan sekali.	Sudah dilaksanakan
8	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi meminta laporan secara tertulis setiap tiga bulan sekali.	Sudah dilaksanakan
9	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi meminta laporan secara lisan setiap tiga bulan sekali.	Sudah dilaksanakan

(sumber data : penelitian 2016)

Hasil penelitian tersebut kemudian peneliti bahas dengan mengaitkan tiap indikator dengan

teori teknik-teknik pengawasan menurut Siagian (2008:115), yaitu :

1. Teknik pengawasan langsung, apabila pimpinan mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang berjalan. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk :
 - 1) Inspeksi Langsung
 - 2) *On-the-spot observation*
 - 3) *On- the-spot-report*
2. Teknik pengawasan tidak langsung, pengawasan yang dilaksanakan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para

bawahan. Berikut ini peneliti jelaskan mengenai hasil pembahasan mengenai pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran, dalam meningkatkan kinerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) (Studi Kasus di Desa Selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran) yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.2
Rekapitulasi Pembahasan Mengenai
Pelaksanaan Pengawasan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Pangandaran dalam Meningkatkan Kinerja Tenaga Kesejahteraan
Sosial Kecamatan (TKSK)
(Studi Kasus di Desa Selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran)

No	Indikator	Hasil Pembahasan
1	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengamati pelaksanaan tugas TKSK dengan melihat teknik pelaksanaan tugas yang dilakukan TKSK.	Belum dilaksanakan dengan baik karena tidak sesuai dengan teori
2	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas TKSK	Sudah dilaksanakan dengan baik sesuai teori
3	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan pengawasan terhadap TKSK dalam pelaksanaan tugasnya.	Belum dilaksanakan dengan baik karena tidak sesuai dengan teori
4	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mendengarkan dan melihat laporan secara langsung dari TKSK.	Sudah dilaksanakan dengan baik sesuai teori
5	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan evaluasi dan koordinasi dengan TKSK secara rutin maupun secara kondisional disesuaikan dengan program yang dijalankan TKSK.	Sudah dilaksanakan dengan baik sesuai teori
6	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi meminta laporan secara tertulis setiap satu bulan sekali	Sudah dilaksanakan dengan baik sesuai teori
7	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi meminta laporan secara lisan setiap satu bulan sekali.	Sudah dilaksanakan dengan baik sesuai teori
8	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi meminta laporan secara tertulis setiap tiga bulan sekali.	Sudah dilaksanakan dengan baik sesuai teori
9	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi meminta laporan secara lisan setiap tiga bulan sekali.	Sudah dilaksanakan dengan baik sesuai teori

(sumber data : penelitian 2016)

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Sosial,

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran dalam meningkatkan kinerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) (Studi

Kasus di Desa Selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran) secara umum telah dilaksanakan dengan baik. Hal itu terbukti dari 9 indikator yang diteliti, 7 indikator sudah dilaksanakan dengan baik, dan 2 indikator belum dilaksanakan dengan baik

4.2 Hambatan-hambatan yang Ditemukan Dalam Pelaksanaan Pengawasan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran dalam Meningkatkan Kinerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) (Studi Kasus di Desa Selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran)

Mengenai pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran dalam meningkatkan kinerja tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) (studi kasus di Desa Selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran) sudah dilaksanakan dengan baik. Walaupun demikian, berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan ditemukan beberapa hambatan-hambatan dari keseluruhan dimensi dalam pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran dalam meningkatkan kinerja tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) (studi kasus di Desa Selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran) antara lain sebagai berikut :

1. Terbatasnya jumlah sumber daya manusia di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sehingga jarang sekali melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan tugas TKSK dengan melihat teknik pelaksanaan tugas yang dilakukan TKSK, ataupun melakukan pengawasan terhadap TKSK dalam pelaksanaan tugasnya secara *on-the-spot observation*.
2. TKSK kurang disiplin yang ditandai dengan seringkali tidak hadir pada saat dilakukan pengarahan, koordinasi, monitoring dan evaluasi, ataupun pada saat TKSK diminta untuk menyampaikan laporan lisan secara langsung, serta tidak membuat dan menyerahkan laporan secara tertulis kepada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran pada waktu yang telah ditentukan.

Dengan demikian berdasarkan hambatan-hambatan tersebut, jika dikaitkan dengan teori

Mukarom dan Laksana (2015:157) tentang maksud pengawasan, maka pengawas tidak dapat :

1. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak,
2. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru
3. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program seperti yang telah ditentukan dengan *planning* atau tidak.

4.3 Upaya-Upaya yang Dilakukan dalam Mengatasi Hambatan yang Ditemukan dalam Pelaksanaan Pengawasan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran dalam Meningkatkan Kinerja Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK) (Studi Kasus di Desa Selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran)

Pengawasan adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengendalikan proses pelaksanaan supaya hasil pekerjaan dapat meningkat ataupun sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam pelaksanaan pengawasan tentu saja ditemukan berbagai hambatan-hambatan. Dengan demikian perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Adapun upaya yang dilakukan harus jelas dan tepat sasaran dengan tujuan pengawasan itu sendiri.

Berdasarkan pada teori yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu tujuan pengawasan menurut Husnaini yaitu sebagai berikut :

1. Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan dan hambatan.
2. Mencegah terulang kembalinya kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan dan hambatan.
3. Meningkatkan kelancaran operasi perusahaan
4. Meningkatkan kinerja perusahaan
5. Melakukan tindakan koreksi terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam pencapaian kinerja yang baik.

Untuk dapat mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Pangandaran untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ditemukan dalam Pelaksanaan Pengawasan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran dalam Meningkatkan Kinerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) (Studi Kasus di Desa Selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran), dapat dilakukan dengan studi lapangan meliputi kegiatan wawancara dan observasi langsung kepada objek penelitian.

Dengan demikian, berikut ini akan peneliti bahas mengenai upaya untuk mengatasi hambatan dari keseluruhan dimensi, antara lain sebagai berikut :

1. Lebih meningkatkan intensitas komunikasi dengan TKSK melalui media komunikasi seperti *handphone*, serta memaksimalkan pengawasan melalui pertemuan monitoring dan evaluasi kinerja TKSK tiap bulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan jika dikaitkan dengan teori tujuan pengawasan Husnaini yaitu :

1. Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan dan hambatan.
2. Mencegah terulang kembalinya kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan dan hambatan.
3. Meningkatkan kelancaran operasi perusahaan
4. Meningkatkan kinerja perusahaan
5. Melakukan tindakan koreksi terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam pencapaian kinerja yang baik.

maka upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran dapat dikatakan belum dilaksanakan dengan baik karena meskipun meningkatkan intensitas komunikasi dengan TKSK melalui media komunikasi seperti *handphone* serta memaksimalkan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi yang dilakukan setiap bulan, pengawasan secara langsung tetap diperlukan untuk mengetahui permasalahan atau hal-hal apa saja yang benar-benar ada di lapangan. Karena terkadang bawahan hanya menyampaikan hal-hal yang baik saja, atau tidak menyampaikan permasalahan yang ada kepada pimpinan supaya kinerjanya terlihat baik. Padahal permasalahan yang ada harus

diketahui oleh pimpinan supaya dapat melakukan tindakan koreksi terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam pencapaian kinerja yang baik.

2. Mengintruksikan kepada ketua forum komunikasi TKSK ataupun TKSK lainnya untuk menyampaikan hasil dari pengarahannya, ataupun monitoring dan evaluasi kepada TKSK yang berhalangan hadir, serta memberikan teguran secara lisan dan himbauan kepada TKSK supaya hadir dan memberikan laporan tertulis kepada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil penelitian dan jika dikaitkan dengan teori tujuan pengawasan Husnaini yaitu :

1. Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan dan hambatan.
2. Mencegah terulang kembalinya kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan dan hambatan.
3. Meningkatkan kelancaran operasi perusahaan
4. Meningkatkan kinerja perusahaan
5. Melakukan tindakan koreksi terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam pencapaian kinerja yang baik.

maka upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran dapat dikatakan belum dilaksanakan dengan baik karena terkadang informasi yang disampaikan oleh selain pihak Dinas tidak tersampaikan dengan jelas sehingga TKSK kurang memahami terhadap apa yang seharusnya dilakukan, hal tersebut mengakibatkan terjadinya kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan dan hambatan tetap tidak dapat dihentikan dan dapat terulang kembali. Demikian pula upaya yang dilakukan dengan memberikan teguran secara lisan dan himbauan kepada TKSK belum dilaksanakan dengan baik, karena dirasa tidak akan berakibat pada peningkatan kinerja TKSK juga tidak dapat menghentikan atau meniadakan kesalahan dan tidak mencegah terulang kembalinya kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan dan hambatan. Oleh karena itu

sikap yang lebih tegas dari Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi diperlukan supaya TKSK menyerahkan laporan tertulis sesuai waktu yang telah ditentukan. Dengan demikian diharapkan upaya yang dilakukan dapat meningkatkan kinerja organisasi pada umumnya, khususnya kinerja TKSK.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan atas penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pengawasan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran dalam Meningkatkan Kinerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) (Studi Kasus di Desa Selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran) secara umum telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini terbukti dari 9 indikator yang diteliti 7 indikator telah dilaksanakan dengan baik, dan 2 indikator belum dilaksanakan dengan baik.
2. Dari 9 indikator yang diteliti, terdapat beberapa hambatan, diantaranya adalah :
 - 1) Terbatasnya jumlah sumber daya manusia atau pegawai di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sehingga jarang sekali melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan tugas TKSK dengan melihat teknik pelaksanaan tugas yang dilakukan TKSK, ataupun melakukan pengawasan terhadap TKSK dalam pelaksanaan tugasnya secara *on-the-spot observation*.
 - 2) TKSK kurang disiplin yang ditandai seringkali tidak hadir pada saat Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran melakukan pengarahan, koordinasi, monitoring dan evaluasi, ataupun pada saat TKSK diminta untuk menyampaikan laporan lisan secara langsung, serta tidak membuat dan menyerahkan laporan secara tertulis kepada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran pada waktu yang telah ditentukan.

3. Upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan-hambatan yang ditemukan antara lain yaitu :

- 1) Lebih meningkatkan intensitas komunikasi dengan TKSK melalui media komunikasi seperti *handphone*, serta memaksimalkan pengawasan melalui pertemuan monitoring dan evaluasi kinerja TKSK tiap bulan.
- 2) Menginstruksikan kepada ketua forum komunikasi TKSK ataupun TKSK lainnya untuk menyampaikan hasil dari pengarahan, ataupun monitoring dan evaluasi kepada TKSK yang berhalangan hadir, serta memberikan teguran secara lisan dan himbauan kepada TKSK supaya hadir dan memberikan laporan tertulis kepada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai waktu yang telah ditentukan.

5.2 Saran

1. Mengenai Pelaksanaan Pengawasan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran dalam Meningkatkan Kinerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) (Studi Kasus di Desa Selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran), hendaknya Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran melakukan pengawasan secara langsung ke lapangan pada saat TKSK menjalankan tugas. Meskipun sumber daya manusia atau pegawai yang ada terbatas, namun pengawasan langsung kepada TKSK dapat dilakukan setidaknya dengan menyempatkan melakukan pengawasan langsung secara bergilir kepada satu orang TKSK setiap bulannya.
2. Untuk mengatasi hambatan yang ditemukan dalam pengawasan TKSK oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran, sebaiknya melakukan pembagian tugas kepada pegawai untuk melakukan pengawasan secara langsung kepada TKSK secara bergantian, sehingga pengawasan secara langsung

dapat dilaksanakan meskipun jumlah sumber daya manusia atau pegawai terbatas.

3. Agar upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran dapat berjalan secara maksimal, kiranya perlu untuk memberlakukan sanksi kepada TKSK yang kurang disiplin. Sehingga dengan demikian, diharapkan kinerja TKSK dapat lebih meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

- Fahmi, Irfan. 2013. *Manajemen Kinerja*. Bandung : Alfabeta
- Handyaningrat, Soewarno. 1994. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: CV.Haji Masagung
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Ciracas: Penerbit Erlangga.
- Lexy Moleong. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mukarom, Zaenal. Laksana, Muhibudin. 2015. *Manajemen Pelayanan Publik*. CV Pustaka Setia. Bandung.
- Pasolong, Harbani. 2013. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Silalahi, Ulber. 2009 . *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Sinambela, Lijan Poltak.2012. *Kinerja Pegawai teori Pengukuran dan Implikasi* Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soehartono, Irawan. 1995. *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2014 . *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2013. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*. Bandung: Alfabeta
- Surachmad, Winarno. 1994. *Dasar dan Teknik Research: Pengantar Metodologi Ilmiah*. Bandung : Tarsito..
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Bandung: Penerbit Pustaka Reka Cipta.

Tangkilisan, Hessel Nogi S, *et al.* 2007. *Manajemen Publik*. Jakarta : Grasindo.

B. Dokumentasi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.

Tentang Penulis :

Desi Mustikawati, lahir di Ciamis pada tanggal 12 Desember 1993. Tercatat sebagai mahasiswa pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Galuh.